



Buletin Parlementaria

Sidak Kelayakan Makanan Selama Ramadan



3 Kutuk Keras
Aksi Terorisme
di Rusia



9 Buka Data
Distribusi
Beras Secara
Transparan

Nomor 1286/IV/III/2024 • Maret 2024



9 772614 339005



Sidak Kelayakan Makanan Selama Ramadan

Komisi IX DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Modern BSD Tangerang Selatan.

Kegiatan ini ialah upaya rutin untuk memastikan ketersediaan makanan yang aman bagi masyarakat, terutama selama bulan puasa.

Dalam sidak tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyampaikan, Komisi IX DPR ingin memastikan bahwa makanan yang dijual di pasar tersebut memenuhi standar keamanan pangan.

"Kita telah berbelanja di pasar tersebut dan berhasil mengumpulkan berbagai jenis makanan seperti ayam, bakso, kerupuk, dan tetelan. Sampel makanan tersebut dilakukan pengujian langsung menggunakan mobil laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan

POM), hasil pengujian menunjukkan bahwa semua produk yang diuji aman untuk dikonsumsi," ungkap Nihayatul Wafiroh usai memimpin sidak tersebut, Kamis (21/3).

Ia menekankan pentingnya upaya ini untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya yang berbelanja di Pasar Modern BSD, dapat memperoleh makanan yang sehat dan aman. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran keracunan makanan, terutama selama bulan puasa, di mana konsumsi makanan dan jajanan meningkat secara signifikan.

"Tujuan kita melakukan itu, kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia terutama yang daerah sini yang belanjanya di Pasar Modern BSD ini bisa mendapatkan makanan yang benar sehat yang benar-benar dibutuhkan sehingga

kita tidak takut lagi adanya keracunan makanan terutama ini waktu bulan puasa," ungkapnya.

Semua produk yang diuji oleh Badan POM dinyatakan aman dan memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Dengan adanya sidak ini, diharapkan bahwa pasar-pasar seperti Pasar Modern BSD dapat terus meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang mereka jual, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan ketersediaan makanan yang aman dan sehat, terutama selama bulan puasa.

"Tadi sudah kita secara *sampling*, kita membeli beberapa jajanan dan *Alhamdulillah* semuanya dinyatakan aman oleh tim dari Badan POM yang ada dengan laboratoriumnya," tutup Nihayatul. ➡ **skr/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengecek produk-produk makanan di Pasar Modern BSD Tangerang Selatan.

Kutuk Keras Aksi Terorisme di Rusia



FOTO: YGA/PDT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ratusan orang menjadi korban aksi terorisme di gedung konser di Moskow, Rusia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbelasungkawa dan mengutuk keras aksi terorisme tersebut.

"Mengucapkan belasungkawa yang mendalam dan mengutuk keras aksi terorisme yang biadab yang dilakukan terhadap rakyat negara sahabat Rusia beberapa waktu yang lalu," kata Dasco, Jakarta, Minggu (24/3).

"Untuk itu sekali lagi kami ucapkan keprihatinan yang mendalam semoga rakyat Rusia dapat melewati hari-hari ke depan dengan tabah dan kami berdoa semoga rakyat Rusia dikuatkan dalam menghadapi kejadian ini," sambung Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Aksi terorisme di mana pun menurut Dasco tak dapat dibiarkan. Dasco berharap warga Rusia dapat melalui tragedi tersebut. "Aksi terorisme di mana pun tidak dapat dibiarkan dan harus ditindak tegas karena aksi-aksi brutal seperti itu tidak dibenarkan dan sangat merugikan seluruh bangsa di dunia," ujar Dasco.

"Kami berharap semoga rakyat Rusia dapat melalui hal ini dengan baik untuk ke depannya," imbuhnya. Jumlah korban tewas akibat penembakan massal di gedung konser di Moskow, Rusia, diketahui bertambah menjadi 133 orang. Lebih dari 100 orang lainnya terluka dalam serangan yang diklaim dilakukan oleh kelompok ISIS tersebut.



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danurtito, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.M.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Iwan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firista Dysie, Balggys Maesynthia, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afhillah, Gerardi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E. Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Rizka

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrusna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapny



Pemerintah Diminta Batasi TNI-Polri Duduki Jabatan Sipil

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah membatasi anggota TNI-Polri untuk duduk di jabatan aparatur sipil negara (ASN). Ia tak ingin anggota TNI-Polri aktif justru semakin banyak duduk di jabatan pemerintahan karena hal itu tidak sesuai dengan amanat reformasi.

"Terakhir, untuk yang TNI (dan) Polri. Ini *kan* amanat reformasi, kita harus betul-betul jalankan Pak Menteri. Agak ada indikasi migrasi dari teman-teman Polri khususnya. Itu kalau kita *release* Pak Ketua, mereka yang masuk eselon I atau II di wilayah sipil itu banyak sekali." Kata Mardani dalam rapat kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)

Abdullah Azwar Anas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Meski ada wacana pembatasan jabatan yang dapat diisi oleh anggota TNI-Polri seperti anggota TNI-Polri hanya bisa mengisi posisi eselon I di level pemerintah pusat, Politisi Fraksi PKS ini mendorong harus tetap ada pemisahan jabatan antara sipil dan anggota TNI-Polri.

"Kasihannya teman-teman yang sudah meniti karir ini ternyata kalah oleh pendekatan-pendekatan lain.

”

KASIHAN TEMAN-TEMAN YANG SUDAH MENITI KARIR INI TERNYATA KALAH OLEH PENDEKATAN-PENDEKATAN LAIN. KITA MEMANG TETAP TERIKAT KEPADA ATURAN, ADA SLOT-SLOT YANG BOLEH, TAPI MUNGKIN KITA PERLU TEGAS BAHWA DI LUAR ITU MEMANG SEBAIKNYA URUSAN SIPIL DISERAHKAN KEPADA TEMAN-TEMAN SIPIL YANG TIDAK KALAH BAIKNYA DENGAN TEMAN-TEMAN TNI-POLRI,

Kita memang tetap terikat kepada aturan, ada slot-slot yang boleh, tapi mungkin kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI-Polri," kata Legislator Dapil Jakarta I ini.

Sebelumnya, Menteri PAN RB Azwar Anas, se usai rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024), menjelaskan, RPP mendatang bakal selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Anas menjelaskan, jabatan sipil yang diduduki TNI/Polri tetap mengacu pada UU No 20/2004 tentang TNI dan UU No 2/2002 tentang Polri sehingga tidak ada yang berubah. Sementara itu, jabatan TNI/Polri yang bisa ditempati ASN masih perlu dibahas.

"Terkait dengan TNI/Polri masih selaras dengan PP No 11/2017, di mana TNI ada batasan untuk menempati posisi di ASN. Begitu pula dengan Polri. Cuma, yang sekarang (dibahas) adalah ASN yang boleh menempati posisi di TNI/Polri, itu yang tak diatur sebelumnya," pungkasnya. [we/aha](https://www.aha.com)



FOTO: ENO/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat rapat kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Setujui Pemberian Kewarganegaraan RI bagi Tiga WNA

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI sepakat menyetujui Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI bagi Tiga WNA, atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, Sau Maarten Vincent Paes. Kesepakatan ini disetujui oleh semua fraksi yang ada di Komisi III DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburrohman yang memimpin rapat tersebut memastikan

persetujuan kepada seluruh peserta rapat.

"Saya ingin mengkonfirmasi, apakah Komisi III DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, Sau Maarten Vincent Paes untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan?" dijawab "setuju" oleh para anggota rapat.

Dalam rapat tersebut

diungkapkan bahwa Tim Nasional membutuhkan posisi pemain penjaga gawang, sayap, gelandang tengah/penyerang berdasarkan permohonan Pelatih Kepala Tim Nasional Indonesia perihal permohonan naturalisasi pemain yang bernama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Sau Maarten Vincent Paes

Sebagai informasi, Pemain Ragnar Anthonio Maria Oratmangoen merupakan pemain yang serba bisa dalam opsi menyerang dengan posisi sebagai pemain sayap sebagai pilihan utama, ia agresif dengan gaya bermain menyerang vertikal yang kerap mematahkan lini pertahanan lawan dan menciptakan peluang mencetak gol bagi rekan satu timnya dan juga dirinya sendiri.

Pemain Thom Jane Marinus Haye merupakan pemain berposisi gelandang tengah. Saat ini ia bermain di SC Heerenveen dan menjadi kapten di klub tersebut. Dia memiliki ketenangan mampu mengatur tempo permainan dan mampu menciptakan peluang dengan umpan jarak jauh yang akurat.

Pemain Maarten Vincent Paes merupakan pemain berposisi penjaga gawang dan bermain di FC Dallas. Memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda, mewakili tim muda Belanda dari level U-19 hingga U-21, ia dikenal sebagai penjaga gawang yang pandai menjaga dan mendistribusikan dengan kakinya.

ssb/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburrohman saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

FOTO: JKA/PDT

KKP Diminta Perhatikan Fenomena Pemutihan Karang

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menyoroti fenomena *coral bleaching* atau pemutihan karang yang tengah menjadi atensi dunia. Ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan atensi terhadap fenomena dan melakukan kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Sekarang lagi ada atensi dari seluruh dunia juga termasuk di Indonesia ini, karena terumbu karang kita yang memutih atau *coral bleaching*. Itu berarti sangat terganggu sekali untuk ekosistem

di laut kita dan jangan sampai kita berbicara tentang PNPB tapi tidak melihat bagaimana dengan keadaan laut kita Pak," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena pemutihan karang, yaitu perubahan suhu, iklim, cahaya, dan nutrisi. Coral bleaching atau pemutihan karang merupakan fenomena yang telah terjadi di beberapa perairan Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena tersebut yaitu perubahan suhu, iklim,

cahaya, dan nutrisi. Hal ini perlu segera diatasi lantaran terumbu karang merupakan tempat tinggal daripada beberapa biota laut termasuk ikan yang menjadi sumber pendapatan nelayan.

"Ini perlu juga kerja sama dengan BRIN, saya tahu dan saya yakin dan percaya Pak Menteri juga sama jajaran sudah mengetahui hal ini. Sehingga ini menjadi atensi utama, takutnya produksi ikan kita itu pasti menurun, karena pengaruhnya *coral bleaching* ini sudah diperbincangkan oleh sampai di kancah negara yang lain," pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

gal/rdn



FOTO: ENO/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/03/2024).



Scan QR untuk berita selengkapnya

KLHK Perlu Beri Stimulus Fiskal Pengelolaan Sampah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan investasi daur ulang sampah dan kehutanan termasuk wisata alam pada tahun 2024 sebesar Rp17,91 triliun. Hal ini tertuang dalam perkiraan target ekonomi KLHK 2024 yang disampaikan oleh Menteri KLHK saat rapat kerja Komisi IV DPR RI pada Kamis (14/3) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong investasi pada sektor pengelolaan sampah, terutama di sektor daur ulang. Suhardi menilai meski nilai yang disampaikan cukup besar namun di

lapangan, nilai ekonomi pada sektor ini terbilang masih cukup rendah.

"Saya terus terang, mendorong investasi di sektor ini utamanya di sektor daur ulang. Hanya saja dari beberapa yang kita tinjau nilai ekonominya sangat rendah. Oleh karenanya perlu didorong untuk diberikan stimulus (fiskal), apakah kredit dengan bunga rendah atau subsidi," kata Politisi Fraksi Partai Demokrat itu dalam rapat.

Legislator Dapil Sulawesi Barat itu menilai bahwa, meski nilai ekonomi pada sektor daur ulang belum bisa mengalahkan sektor lainnya namun sektor ini memberikan keuntungan lain dari sisi lingkungan. Ia meyakini bahwa banyak persoalan lingkungan dapat teratasi apabila sektor ini dapat berkembang dengan baik.

"Saya melihat bahwa bukan nilai ekonominya tapi kita untung besar di nilai lingkungan. Keuntungannya di situ. Jadi kalau ini terdorong terus saya yakin persoalan-persoalan lingkungan kita bisa teratasi dengan baik," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Suhardi juga memberikan apresiasi terhadap perkiraan nilai transaksi keuangan kelompok tani hutan dari produksi barang dan hasil hutan bukan kayu di tahun 2024 yang mencapai Rp2 triliun. Menurutnya perlu adanya dorongan dan dukungan kepada kelompok madu, kelompok pengelola wisata dan dan kelompok lain yang berkegiatan di kawasan kehutanan agar bisa menggenjot transaksi hingga mencapai nilai tersebut. **uc/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka.

FOTO: ENO/PDI

Pencarian KM Yuiee Jaya II Belum Maksimal

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menyoroti pencarian korban tenggelamnya Kapal Motor (KM) Yuiee Jaya II di Kepulauan Selayar, Sulsel. Ia menilai, pencarian kapal tenggelam yang dilakukan Basarnas masih belum maksimal. Pasalnya, selama ini pencarian hanya menggunakan satu *Rigid Inflatable Boat* (RIB).

Basarnas diminta untuk menggunakan teknologi tinggi?," Hamka B Kady menambahkan.

Sebelumnya, Basarnas Makassar mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR Kamajaya 104 untuk mencari korban tenggelamnya KM Yuiee Jaya II yang mengangkut 21 anak buah kapal (ABK). KM Yuiee Jaya 2 dilaporkan

tenggelam setelah beberapa ABK ditemukan terdampar di Jamepa, Kepulauan Selayar Senin (11/3).

Mereka kemudian menyampaikan kapalnya dengan 35 orang POB terbalik dan tenggelam setelah dihantam badai, Sabtu (9/3) dini hari, sekira 52 nautical mil dari Pelabuhan Benteng Selayar. [hal/rdn](#)

”

BASARNAS BERAPA LAGI RIB YANG AKAN DIBELI UNTUK PERSIAPAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE-NYA. APA BELUM BISA TERCAPAI? MARI KITA BICARAKAN AGAR MAKSIMAL DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN ALAT.

"Ada kapal nelayan tenggelam baru 12 orang ditemukan selamat di Kepulauan Selayar, sedangkan RIB di Selayar itu hanya satu buah saja. Padahal di situ laut bebas," tegasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kepala Basarnas dan Kepala BMKG di Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Maka dari itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun meminta Basarnas agar membicarakan kebutuhan yang diperlukan kepada Komisi V untuk persiapan *Minimum Essential Force* (MEF). "Basarnas berapa lagi RIB yang akan dibeli untuk persiapan *Minimum Essential Force*-nya. Apa belum bisa tercapai? Mari kita bicarakan agar maksimal dalam melakukan pembelian alat," katanya.

"Apa yang harus dilakukan?"



FOTO: MARI/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kepala Basarnas dan Kepala BMKG di Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Buka Data Distribusi Beras Secara Transparan

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta pemerintah untuk membuka kepada publik data distribusi beras yang selama ini dilakukan pemerintah. Baik itu, distribusi beras impor maupun beras dari serapan petani lokal. Termasuk ke mana distribusi beras hasil impor pemerintah yang dinilai cukup besar, yakni 3,5 juta ton pada tahun 2023 lalu.

Bansos dan sebagainya. Sehingga jadi pertanyaan, ini pemerintah punya kendali nggak sih terhadap produk-produk yang terkait dengan kebutuhan pokok?" ujar Amin dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Amin selanjutnya menegaskan pentingnya pemerintah memiliki kendali dalam mengelola beras. Salah satunya dengan menyerap semaksimal mungkin gabah produksi petani. Sehingga, bukan swasta yang menguasai tata niaga beras dalam negeri.

"Mestinya ini Bulog atau siapa saja saya melihat pemerintah itu harus mampu menyerap produksi gabah petani sebanyak mungkin. Jangan seperempatnya yang diserap oleh swasta, sehingga kita menguasai tata kelolanya, tata niaganya, produksinya, jalur distribusinya, kita bisa mengendalikan itu," jelasnya.

Sebagai informasi, sejak akhir tahun 2024 hingga memasuki bulan Ramadan, harga beras diketahui tak kunjung stabil. Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 13 Maret 2024, harga beras medium mencapai angka Rp14.380

— bis/rdn

”

MESTINYA INI BULOG ATAU SIAPA SAJA SAYA MELIHAT PEMERINTAH ITU HARUS MAMPU MENYERAP PRODUKSI GABAH PETANI SEBANYAK MUNGKIN. JANGAN SEPEREMPATNYA YANG DISERAP OLEH SWASTA, SEHINGGA KITA MENGUASAI TATA KELOLANYA, TATA NIAGANYA, PRODUKSINYA, JALUR DISTRIBUSINYA, KITA BISA MENGENDALIKAN ITU.

Amin memahami adanya pergeseran musim tanam hingga bencana El Nino menyebabkan kelangkaan beras dan tingginya harga beras. Hal ini yang menjadi alasan pemerintah kemudian melakukan impor beras dalam jumlah yang besar. Bahkan impor terbesar sejauh ini. Namun, ternyata solusi impor tersebut tak lantas membuat harga beras menurun.

Dari hal tersebut, Amin lantas mempertanyakan bagaimana manajemen distribusi beras yang dilakukan pemerintah selama ini.

"Berapa yang diimpor, berapa yang untuk memenuhi kebutuhan rutin, berapa yang digunakan untuk



FOTO: OLI/PDI

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Lifting Migas Masih Jauh dari Target

Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul mempertanyakan kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait lifting Minyak dan Gas (Migas) yang masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.

minta dipaparkan K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) mana saja yang mengalami penurunan lifting dan mana yang mengalami peningkatan produksi Migasnya. Dari sana akan terlihat jelas kinerja masing-masing K3S yang ada. Sehingga akan mudah dilakukan pemetaan untuk mengatasi penurunan lifting Migas tersebut.

Dengan kata lain, Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap SKK Migas dapat meningkatkan lifting dari sumur-sumur yang telah ada. Sehingga perlahan akan mendekati target lifting Minyak yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebesar 1 juta barel di tahun 2030 mendatang. — ayu/rdn

”

TERKAIT TARGET SKK MIGAS INI SEPERTINYA MEMANG TIDAK TERCAPAI. PADA AKHIRNYA BERDAMPAK PADA IMPOR MINYAK KITA. JADI, INI MERUPAKAN BEBAN PEMERINTAH KETIKA SKK MIGAS TIDAK BISA MENINGKATKAN *LIFTING*-NYA, MAKA IMPOR TETAP MENJADI SEBUAH KEBUTUHAN BAGI KITA.

"Terkait target SKK Migas ini sepertinya memang tidak tercapai. Pada akhirnya berdampak pada impor minyak kita. Jadi, ini merupakan beban pemerintah ketika SKK Migas tidak bisa meningkatkan *lifting*-nya, maka impor tetap menjadi sebuah kebutuhan bagi kita," ujar Hendrik, saat RDP Komisi VII DPR dengan SKK Migas di Ruang rapat komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (13/3).

Dijelaskannya, dengan tidak tercapainya target lifting Migas itu juga bisa terlihat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sektor ESDM (energi dan sumber daya mineral) tahun 2023, sebesar Rp116 triliun. Padahal di Tahun 2022 lalu PNBP di sektor tersebut sebesar 148,70 triliun.

Oleh karenanya pihaknya



FOTO: FHN/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul saat mengikuti RDP Komisi VII DPR dengan SKK Migas di Ruang rapat komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dukung Kemenag Mitigasikan Haji Ramah Lansia

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mendukung strategi mitigasi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang ramah lansia. Hal ini disampaikan dalam Kunspek (Kunjungan Spesifik) Tim Komisi VIII DPR RI di Kantor Walikota Tangerang dalam rangka Pelaksanaan Ibadah Haji 2024, Kamis (14/3).

"Komisi VIII DPR RI mendukung sepenuhnya strategi mitigasi Kementerian Agama dalam rangka penyelenggaraan haji ramah lansia," ujar Ashabul Kahfi.

Dikatakannya, ada lima strategi yang telah dijelaskan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat

kerja bersama Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta pada Rabu 13 Maret 2024.

Pertama, melakukan pemindaian kesehatan sebagai syarat pelunasan. Kedua, memberikan kesempatan pelunasan bagi pendamping jemaah lansia pada pelunasan tahap dua. Ketiga, menyediakan fasilitas ramah lansia sejak di dalam negeri sampai dengan di Arab Saudi.

"Keempat, menyiapkan sajian atau menu khusus bagi jemaah haji lansia, serta petugas khusus yang melayani lansia," ujar Politisi Fraksi PAN ini.

Sejalan dengan DPR, Pemkot Tangerang turut mendukung upaya Kemenag dalam upaya penyelenggaraan haji 2024 ramah lansia.

Pj Walikota Tangerang Nurdin mengatakan akan turut membantu jemaah haji lansia dalam mengajukan pendamping, serta mengedukasi jemaah untuk saling tolong-menolong, terutama menolong dan membantu jemaah lansia.

"Kami juga berencana memberikan edukasi kepada jemaah haji untuk saling tolong-menolong di antara sesama jemaah haji, khususnya bagi jemaah haji lansia agar lebih diperhatikan dan diprioritaskan lebih awal baik saat masih di daerah asal hingga pelaksanaan haji di Arab Saudi sampai pulang kembali ke tanah air," sambungnya. ➡ **tn/rdn**



FOTO: TN/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat bertukar cenderamata di sela-sela Kunspek (Kunjungan Spesifik) Tim Komisi VIII DPR RI di Kantor Walikota Tangerang, Kamis (14/3/2024).

Angka Inflasi Meningkat, Risiko Stunting di Depan Mata

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher menyatakan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak serius pada akses masyarakat terhadap pangan bergizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

"Peningkatan inflasi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan. Jika pangan sumber protein dan zat gizi lainnya mahal, tentunya banyak keluarga yang berisiko tidak mampu menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anaknya. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan risiko *stunting*. Pemerintah harus

mengambil langkah-langkah efektif untuk mengendalikan inflasi," kata Netty dalam keterangan medianya, Jumat (15/3/2024).

Menurutnya, kampanye penurunan *stunting* yang sudah dilakukan dengan gencar dan terus menerus harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah menyediakan sumber pangan bergizi yang mudah dan murah.

"Jangan sampai kampanye penurunan *stunting* hancur berantakan dan tidak ada maknanya

karena masyarakat sulit mengakses sumber bahan pangan untuk kesehatan remaja, ibu hamil dan menyusui," tandas Netty.

Oleh sebab itu, katanya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah *stunting* guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal generasi muda Indonesia.

"Pengendalian inflasi untuk ketersediaan pangan mudah dan murah adalah salah satu PR yang harus dipikirkan pemerintah agar risiko

”

APA LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH PENINGKATAN INFLASI DAN MEROKETNYA HARGA BAHAN PANGAN? APALAGI KITA BERADA DALAM BULAN SUCI RAMADAN DIMANA KEBUTUHAN AKAN BAHAN-BAHAN POKOK MENINGKAT SECARA DRASTIS. PERMINTAAN YANG TINGGI AKAN MEMBUAT PERSEDIAAN MENIPIS YANG BAKAL SEMAKIN MEMICU NAIKNYA HARGA-HARGA.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher.

peningkatan *stunting* dapat ditekan," kata politisi PKS Dapil Jabar VIII ini. Sebagaimana diketahui, berdasarkan data BPS, angka inflasi Februari 2024 mengalami peningkatan di level 2,75% dibandingkan bulan Januari yang 2,57%.

"Apa langkah pemerintah untuk mencegah peningkatan inflasi dan meroketnya harga bahan pangan? Apalagi kita berada dalam bulan suci Ramadan dimana kebutuhan akan bahan-bahan pokok meningkat secara drastis. Permintaan yang tinggi akan membuat persediaan menipis yang bakal semakin memicu naiknya harga-harga," tambah Netty.

FOTO: MEN/PDT

rnm/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Revitalisasi Stadion Delta Sidoarjo Penuhi Standar FIFA

Anggota Komisi X DPR RI, Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, menyoroti proyek revitalisasi Stadion Delta Sidoarjo yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Revitalisasi tersebut ditujukan untuk memenuhi standar FIFA dari segi kualitas pelayanan, baik kepada suporter sepak bola dan pengunjung.

Diketahui, Pemerintah pusat saat ini sedang gencar-gencarnya renovasi total 22 stadion di seluruh Indonesia, termasuk Stadion Delta Sidoarjo menjadi salah satu yang mendapat perhatian.

"Dengan renovasi ini, kami berharap dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi penonton. Meskipun kapasitas stadion menurun dari 35.000 menjadi 19.000, prioritas utamanya

adalah memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengunjung," ungkap Sukawijaya alias Yoyok Sukawi kepada *Parlementaria* di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur Kamis (14/3).



DENGAN RENOVASI INI, KAMI BERHARAP DAPAT MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN BAGI PENONTON. MESKIPUN KAPASITAS STADION MENURUN DARI 35.000 MENJADI 19.000, PRIORITAS UTAMANYA ADALAH MEMBERIKAN PENGALAMAN YANG LEBIH BAIK BAGI PARA PENGUNJUNG.

Dia juga mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR telah menetapkan standar khusus yang sesuai dengan standar FIFA. Sehingga, Stadion Delta Sidoarjo memiliki potensi untuk menjadi tuan rumah acara internasional seperti Piala Dunia.

"Selain digunakan untuk pertandingan sepak bola, stadion yang direvitalisasi ini juga dapat dipergunakan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian. Dengan demikian, stadion ini tidak hanya akan bermanfaat bagi elemen sepak bola, tetapi juga bagi elemen agamis di Sidoarjo," tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Dirinya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur olahraga yang seragam di seluruh Indonesia adalah langkah penting dalam mempercepat perkembangan sepak bola di tanah air. Dengan harapan bahwa perbaikan infrastruktur ini akan membantu mengangkat prestasi sepak bola Indonesia di tingkat internasional. [upi/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi X DPR RI, Sukawijaya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur Kamis (14/03/2024).

FOTO: UUP/PDT

Jelang Lebaran, Masyarakat Diimbau Tak Tergoda Pinjol Ilegal

Layanan pinjaman online (pinjol) tampaknya masih akan bergeliat jelang lebaran, di tengah konsumsi masyarakat yang kian meningkat. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny mewanti-wanti agar memilih layanan pinjol yang sudah registrasi di OJK.

"Tentunya kami imbau masyarakat setidaknya teliti. Terlebih pinjol ilegal marak menjamur. Masyarakat harus jeli melihatnya," ujar Jefry ditemui usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI ke Bandung, Jawa

Barat, Kamis (14/3). Kunjungan kali ini, Komisi XI melakukan pertemuan dengan perwakilan OJK dan bank-bank Himbara membahas persiapan perbankan selama ramadan dan lebaran.

”

KAMI TETAP MELAKUKAN PENGAWASAN. KE DEPAN KAMI LIHAT PELAKSANAANNYA. KALAU DITEMUKAN YANG TIDAK SESUAI KAMI SAMPAIKAN. DEMI MENJAGA KEPUASAAN MASYARAKAT.

Selain perkara pinjol ilegal, Jefry juga menyoroti potensi peredaran uang palsu di tengah maraknya pertukaran uang jelang hari raya. Untuk itu ia meminta masyarakat lebih teliti dan memprioritaskan penukaran uang di bank-bank terdekat.

Mengenai komitmen Komisi XI dalam mengawasi jalannya sektor keuangan, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong OJK dan perbankan melakukan fungsinya. "Kami tetap melakukan pengawasan. Ke depan kami lihat pelaksanaannya. Kalau ditemukan yang tidak sesuai kami sampaikan. Demi menjaga kepuasan masyarakat," urainya.

Jefry pun mengapresiasi OJK dan perbankan Himbara karena sejauh ini telah menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dimana layanan perbankan dan keuangan tetap berjalan normal seperti bulan-bulan biasanya. **aha**



FOTO: AHA/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/3/2024).



Aglomerasi Jangan Sampai Cabut Otonomi Daerah Kota Satelit

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berharap prinsip dari aglomerasi yang melekat dengan Jakarta tidak menabrak prinsip otonomi daerah yang melekat dengan kota-kota satelit. Sebab itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah untuk menyusun sekaligus pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) dengan landasan kehati-hatian.

Pernyataan tersebut disampaikan Baidowi saat memimpin Rapat Panja Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3). Ia menekankan bahwa aglomerasi ini jangan sampai mencampuri kewenangan daerah jika nantinya RUU DKJ disahkan dan diimplementasikan.

"Sebagaimana semangat awal, saat kita meriviu terkait dengan aglomerasi agar tidak mencampuri kewenangan otonomi daerah (kota satelit) masing-masing. Ini yang perlu dipikirkan adalah persoalan Jakarta ini tidak bisa lepas dari persoalan daerah sekitar. Jadi, (DIM ini) gak ada niatan untuk menghapus otonomi daerah," ucap Politisi Fraksi PPP itu.

Lebih lanjut, Anggota Baleg DPR RI Mardani Ali Sera mendukung Jakarta menjadi sebuah provinsi yang memiliki daya saing tinggi dengan segala potensi dan peluang ekonomi yang dimiliki. Walaupun begitu, ia mengingatkan bahwa pemerintah Jakarta tidak bisa mencampuri kewenangan pemerintah kota-kota satelit di sekitarnya.

”

**INI YANG PERLU
DIPIKIRKAN ADALAH
PERSOALAN
JAKARTA INI TIDAK
BISA LEPAS DARI
PERSOALAN DAERAH
SEKITAR. JADI, (DIM
INI) GAK ADA NIATAN
UNTUK MENGHAPUS
OTONOMI DAERAH.**

Maka dari itu, ia sepakat pembahasan DIM RUU DKJ jangan sampai menabrak aturan dan prinsip otonomi daerah. Seharusnya, tuturnya, semangat sinergi sekaligus kolaborasi antara Jakarta dan kota-kota satelit yang harus diutamakan.

Terakhir, Anggota Baleg DPR RI Herman Khaeron menekankan agar pemerintah konsisten terhadap peraturan pembahasan DIM RUU DKJ. Hal ini menjadi krusial agar hasil dari pembahasan RUU menjadi lebih komprehensif, tidak timpang, serta tidak tumpang tindih dengan regulasi terkait. **ts/rdn**



FOTO: DEP/PIBT

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi saat memimpin Rapat Panja Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2023). (7/3/2024).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Tak Ada Anggaran Subsidi Pangan di APBN 2024 yang Dirancang Pemerintah

Anggota Badan Anggaran DPR RI My Esti Wijayati mengungkapkan dalam APBN 2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, tidak ada kebijakan anggaran untuk subsidi harga pangan. Sebab itu, ia menilai Pemerintah pusat perlu ambil andil agar bagaimana caranya menurunkan harga-harga

barang tersebut, termasuk adanya kemungkinan penggunaan APBN untuk subsidi.

"Kemarin kan kita tidak melakukan pembahasan di anggaran untuk 2024 terkait dengan subsidi. Misalnya ke subsidi harga pangan, memang tidak ada di dalam pos anggaran itu. Tetapi situasi kalau ini apalagi ini menjelang Ramadan, menjelang hari raya, kita tidak hanya berbicara soal

sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa membantu masyarakat dengan ada pasar murah pasar murah," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Adapun program pemerintah lainnya, seperti PKH, bantuan pangan non tunai yang sekarang diubah menjadi tunai sebesar Rp200 ribu per bulan, dirinya berharap program itu bisa terus berjalan, bahkan diperluas.

"Harapannya semakin banyak masyarakat yang memang dalam posisi sangat membutuhkan ini akan bisa terbantu dengan program ini," harapnya. — [hal/rdn](#)

”

KEMARIN KAN KITA TIDAK MELAKUKAN PEMBAHASAN DI ANGGARAN UNTUK 2024 TERKAIT DENGAN SUBSIDI. MISALNYA KE SUBSIDI HARGA PANGAN, MEMANG TIDAK ADA DI DALAM POS ANGGARAN ITU. TETAPI SITUASI KALAU INI APALAGI INI MENJELANG RAMADAN, MENJELANG HARI RAYA, KITA TIDAK HANYA BERBICARA SOAL (PASOKANNYA) ADA, TETAPI KITA JUGA MESTI BICARA HARGA DAN KEMAMPUAN BAYAR BAGI MASYARAKAT.

(pasokannya) ada, tetapi kita juga mesti bicara harga dan kemampuan bayar bagi masyarakat," jelas Esti, Selasa (5/3).

Berdasarkan peninjauannya, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada beras saja, tetapi beberapa kebutuhan pokok lainnya juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

"Dengan fakta yang berada di lapangan beberapa hari ini kami berkeliling di berbagai tempat, yang memang pemerintah daerah juga



Anggota Badan Anggaran DPR RI My Esti Wijayati.

FOTO: RSB/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tinjau Kembali Kebijakan Pajak Peralatan Medis

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Sadarestuwati mengemukakan kekhawatirannya terkait biaya peralatan medis yang tinggi di Indonesia. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas peralatan medis tentu berdampak pada kenaikan harga dan biaya di rumah sakit.

Hal ini mengingat adanya perbedaan harga peralatan medis antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebabkan oleh pajak yang tinggi di Indonesia.

"Jadi, peralatan harus di-*upgrade* ini tentunya akan berkaitan dengan kenaikan dari harga, biaya di rumah sakit. Maka, disini pemerintah yang harus hadir. Tadi disampaikan oleh Bapak *General Manager* (GM) bahwasanya kenapa bisa

harganya, biayanya tinggi. Karena, memang pajaknya yang sangat tinggi dibandingkan tadi," kata Sadarestuwati di Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Columbia Asia Medan, Medan, Sumatera Utara, Senin (11/3).

Lebih lanjut, kata Sadarestuwati, juga menyoroti perlunya kebijakan pajak yang lebih tepat terutama untuk peralatan medis yang digunakan untuk melayani masyarakat. Sadarestuwati menekankan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa tidak hanya barang-barang mewah yang dikenakan tarif pajak tinggi, tetapi juga peralatan medis yang digunakan untuk kepentingan publik harus diberikan perlakuan pajak yang lebih ringan.

"(Alat) ini untuk melayani masyarakat yang harus diturunkan pajaknya, sehingga masyarakat bisa menikmati, tidak perlu masyarakat disubsidi, dikasih uang subsidi untuk

lebih murah bagi untuk kalangan menengah ke atas," tambahnya.

Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan juga menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak menimbulkan ketakutan pada pasien. Dirinya menegaskan bahwa rumah sakit seharusnya tidak mengambil keuntungan dari ketakutan pasien, melainkan memberikan pelayanan yang baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Tetapi juga satu lagi, pelayanan harus bagus. Jangan dokter-dokter itu kemudian *menakut-nakutin*. Ini nanti umurnya tinggal sekian, ini nanti harus berobatnya begini. Jangan kemudian rumah sakit justru akan mengambil keuntungan, ketika ada ketakutan dari pasien," ujarnya.

— aas/aha



FOTO:AAS/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota BURT DPR RI Sadarestuwati saat mengikuti Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Columbia Asia Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Senin (11/03/2024).

Dukung Peningkatan Hubungan Diplomatik RI-Bosnia

Sebagai sesama pendiri gerakan non-blok, Indonesia dengan Yugoslavia yang kemudian terbagi menjadi Serbia dan salah satunya Bosnia dan Herzegovina dalam sejarahnya memiliki hubungan yang dekat. Baik hal itu dalam beragam kesamaan dan kedekatan secara historis.

Bahkan, sebagai wujud solidaritas masyarakat Indonesia waktu itu pada zaman Presiden Soeharto membuat sebuah Masjid terbesar di Sarajevo yaitu Masjid Istiqlal Sarajevo yang biasa disebut juga Masjid Indonesia di Bosnia ketika mengalami masa perang di awal tahun 1990-an.

Namun demikian, Ketua Badan

Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan pihaknya tak ingin berhenti sampai disitu. Pihaknya menyatakan ingin semakin meningkatkan hubungan yang lebih baik lagi dengan Parlemen Bosnia, meski juga telah memiliki adanya grup kerjasama bilateral antara kedua Parlemen. Utamanya, dalam hal kunjungan wisatawan dan kemudahan visa.

"Mereka ingin disampaikan oleh Duta Besar semakin banyak orang Indonesia yang mengunjungi Bosnia, terutama karena cukup banyak situs-situs yang penting disana dan bersejarah karena dahulu Bosnia juga bagian dari Imperium Ottoman yaitu Kesultanan Utsmaniyah. Jadi mereka berharap makin banyak kunjungan,"

ujar Fadli usai menerima kunjungan Dubes Bosnia-Herzegovina untuk Indonesia Armin Limo di Ruang Delegasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3).

Maka, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mengusulkan kepada Dubes Bosnia agar diperlukan juga adanya upaya kemudahan di dalam visa atau bebas visa bagi wisatawan Indonesia. "Itu akan membuat orang lebih mudah untuk menjangkau kesana. Kita sudah ada kunjungan-kunjungan *official* dan mereka ingin ini akan lebih banyak lagi ke depan sehingga menjadi jembatan hubungan kedua negara melalui parlemen," pungkasnya.

pun/aha



FOTO: OJI/PDT

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menerima courtesy call Dubes Bosnia-Herzegovina untuk Indonesia Armin Limo di Ruang Delegasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Indonesia Harus Jadi Pelopor Perlindungan Hak Anak dan Perempuan di Palestina

Krisis kemanusiaan di Palestina yang belum menemui titik terang, masih menjadi sorotan utama oleh negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Berbagai upaya diplomasi terus ditempuh melalui forum-forum internasional, salah satunya Konferensi ke-18 Parlemen OKI atau *Parliamentary Union of OIC Countries (PUIC)*.

Di forum rapat komisi Hak Asasi Manusia (HAM) dan perempuan, Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fathan Subchi Badawi mengatakan perlu

ada langkah nyata dalam memberikan perlindungan hak hidup untuk anak-anak dan perempuan di Palestina. Hak hidup, lanjut Fathan, dapat diimplementasikan terkait dengan pemenuhan hak atas air bersih hingga pendidikan.

"Kita mendesak kepada Negara Islam yang lain untuk terus mendesak Israel untuk dimasukkan dalam kejahatan internasional. Juga kita meminta Indonesia sebagai pelopornya agar hak-hak perempuan dan anak di Palestina terpenuhi secara baik, kesehatannya, air bersihnya, dan pendidikannya," ujarnya di Abidjan, Pantai Gading, Selasa (5/3).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, melalui forum diplomasi antarpemerintah, diharapkan dapat melahirkan resolusi yang mendesak untuk dihentikannya kejahatan perang di Palestina. Serta mendukung perdamaian dunia pada lingkup yang lebih luas.

"Resolusi-resolusi yang kita hasilkan nanti bisa menghasilkan kontribusi bagi perbaikan nasib mereka terutama anak-anak dan wanita yang selama ini mengalami diskriminasi dan situasi yang tidak menguntungkan di dalam negara yang dijajah Israel," tutupnya. — tvr/rdn

”

RESOLUSI-RESOLUSI YANG KITA HASILKAN NANTI BISA MENGHASILKAN KONTRIBUSI BAGI PERBAIKAN NASIB MEREKA TERUTAMA ANAK-ANAK DAN WANITA YANG SELAMA INI MENGALAMI DISKRIMINASI DAN SITUASI YANG TIDAK MENGUNTUNGKAN DI DALAM NEGARA YANG DIJAJAH ISRAEL.

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fathan Subchi Badawi.



FOTO: MUN/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sepakat Perbaiki Tata Kelola Maritim Indonesia

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kelautan (Pansus RUU Kelautan) DPR RI menyatakan sepakat untuk melakukan pendalaman RUU Kelautan. Usai menyerap masukan dan aspirasi dari berbagai instansi yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia, Pansus RUU Kelautan akan menerima usulan Daftar Isian Masalah (DIM) dari pihak pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pansus RUU Kelautan DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian

Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PAN Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).

"Dengan hadirnya para perwakilan dari delapan fraksi hari ini, kami menyatakan sepakat untuk melakukan pendalaman terhadap RUU Kelautan," ucap Utut.

Selama agenda tersebut berlangsung, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengingatkan agar

masing-masing kementerian dan lembaga terkait mengedepankan semangat sinergitas dan kolaborasi sehingga ego institusional tidak terjadi. Hal ini menjadi sorotannya agar RUU Kelautan tidak menjadi paket regulasi yang timpang dan tumpang tindih karena melibatkan banyak pemangku kebijakan terkait.

Menutup pernyataannya, dirinya bersama para anggota pansus RUU Kelautan DPR juga mendukung untuk memperkuat maritim Indonesia dengan memperbaiki tata kelola kemaritiman. Tidak hanya itu saja, Pansus RUU Kelautan akan mempertimbangkan pembentukan Indonesian Coast Guard. **ts/rdn**



FOTO: JKA/PDT

Ketua Pansus RUU Kelautan DPR RI Utut Adianto saat memimpin Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



RUU Kelautan Masih Serap Aspirasi Mitra Terkait

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Kelautan DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan bahwa pembahasan tata kelola dan penguatan keamanan sekaligus pertahanan maritim tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Sebab itu, ia sepakat bahwa RUU Kelautan perlu dibahas dari berbagai perspektif serta komprehensif dari para mitra terkait.

Oleh karena itu, Sturman menilai Panja RUU Kelautan masih perlu menyerap aspirasi dari mitra terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Walaupun begitu, ia mengapresiasi keputusan masing-masing kementerian dan lembaga yang hadir untuk berupaya mengedepankan sinergi dan kolaborasi demi

”

KEMENTERIAN DAN INSTANSI YANG) MEMILIKI WEWENANG UNTUK MELINDUNGI DI LAUT LEPAS INI TADI JUGA SUDAH ADA KOMITMEN (UNTUK MENYELESAIKAN RUU KELAUTAN. ARTINYA DARI SELURUH MITRA RUU KELAUTAN INI BERUSAHA UNTUK MEMBERIKAN KEMAJUAN ATAU BERSINERGI.

menyelesaikan RUU Kelautan ini. Menurutnya, RUU Kelautan akan selesai dibahas pada masa periode DPR RI, yang berakhir pada tahun ini.

“(Kementerian dan instansi yang) memiliki wewenang untuk melindungi di laut lepas ini tadi juga sudah ada komitmen (untuk menyelesaikan RUU Kelautan. Artinya dari seluruh mitra RUU Kelautan ini berusaha untuk memberikan kemajuan atau bersinergi,” tanggap Sturman kepada **Parlementaria** usai rapat kerja Pansus di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) dinilai belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut. Padahal, Indonesia menjadi poros maritim yang strategis di mata dunia.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kewenangan untuk penegakan hukum di lautan Indonesia tidak satu visi dan misi serta tumpang tindih antar kementerian dan lembaga. Diketahui, pemangku kebijakan yang terlibat dalam penyusunan RUU Kelautan ini di antaranya Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (ts/rdn)

pun/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Kelautan DPR RI Sturman Panjaitan saat mengikuti Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

FOTO: JKA/PDT

BK Teken MoU dengan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan kerja sama dengan Universitas Swadaya Gunung Jati dalam rangka implementasi *meaningfull public participation* dalam merumuskan suatu rumusan undang-undang yang dirancang oleh DPR RI yang diselenggarakan di Cirebon, Jumat (15/3).

Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul mengungkapkan hal ini sangat penting sebagai amanah dari Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan partisipasi publik dalam setiap perumusan suatu undang-undang.

"Kemitraan Badan Keahlian dengan perguruan tinggi itu merupakan sebuah kebutuhan

bahkan keharusan karena kerjasama ini bagian dari metode untuk menerapkan *meaningfull public participation* untuk pembuatan undang-undang yang telah ditetapkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Sensi, sapaan akrabnya.

Universitas Swadaya Gunung Jati dinilai sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar dan terbaik di Cirebon, Jawa Barat sehingga dapat memberikan masukan yang komprehensif kepada BK DPR RI.

"Perguruan Tinggi Universitas Swadaya Gunung Jati ini merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di Cirebon dan banyak keahlian di universitas ini yang bisa melakukan kerjasama dengan badan keahlian DPR RI dalam menyiapkan naskah

atau konsep kebijakan di DPR RI," lanjutnya.

Dalam kesempatan ini juga BK DPR RI menerima mahasiswa mahasiswi pilihan dari kampus Universitas Swadaya Gunung Jati untuk diberikan kesempatan menimba ilmu dengan magang secara langsung di DPR RI yang ditempatkan langsung ke dalam Badan Keahlian DPR RI.

"Ada beberapa mahasiswa mahasiswi yang sangat ingin melakukan kegiatan magang di DPR RI, tentu ini kami sambut baik dan harus difasilitasi dan mudah mudahan mereka nanti bisa banyak belajar dan bisa mematangkan kesadaran akademis dan kemampuan mereka sehingga dapat menghasilkan SDM yang menghasilkan wawasan luas," tutupnya. **pdt/aha**



FOTO: PRIMA

Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul saat mengikuti FGD serta melakukan kerja sama dengan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) di Cirebon, Jumat (15/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kepala BK Terima Parlemen Inggris, Diskusi Seputar RUU KUHP

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul menerima kunjungan delegasi Parlemen Inggris dalam rangka pembahasan pembentukan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ia mengatakan delegasi Inggris tertarik untuk mempelajari sistem hukum pidana di Indonesia melalui RUU KUHP.

"Delegasi dari Inggris tertarik untuk mempelajari bagaimana Parlemen Indonesia merancang Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti kita tau RUU KUHP awalnya

juga melalui Badan Keahlian," kata Inosentius dalam wawancaranya kepada **Parlementaria** di Gedung nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3).

Menurutnya, proses pembentukan Undang-Undang, termasuk saat proses pembentukan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sangat penting. Untuk itu penetapan RUU KUHP menjadi Undang-Undang (UU) adalah langkah besar dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

"Sistem hukum di Inggris dengan Indonesia sangat berbeda seperti yang kita tau Inggris kuat dalam

peradilan sedangkan Indonesia berbasis pada hukum tertulis," pungkas Inosentius.

Lebih lanjut, pihaknya menerima semua usulan delegasi Parlemen Inggris mengenai pembahasan RUU KUHP yang direncanakan akan diselesaikan pada periode mendatang.

"Pembahasan RUU KUHP jika melihat pada sisa masa jabatan periode ini tentu tidak akan terkejar. Pihak delegasi Inggris menyampaikan sejumlah usulan dan kita terima untuk selanjutnya kita bahas di periode selanjutnya," tambahnya.

tn/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul saat menerima kunjungan delegasi Parlemen Inggris di Gedung nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

FOTO: MRR/PDI



Ketua Tim Peninjauan BAKN DPR RI, Hendrawan Supratikno, dalam foto bersama usai meninjau pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Demak, Jawa Tengah, Rabu (13/03/2024).

FOTO: ICA/PDT

